**ANALISIS REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA PNBP BERBASIS KINERJA DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*  PADA PPSDK**

**Neng Ana Nurul Fauziah, Marismiati, Khairaningrum Mulyanti**

**Program Studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan**

**Politeknik Pos Indonesia**

**Jalan Sariasih No. 54, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40151**

**email:** [**Nengananf@gmail.com**](mailto:Nengananf@gmail.com)

**Abstrak -** Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pendapatan dan belanja PNBP pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 dengan menggunakan konsep *value for money.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder laporan pendapatan dan belanja PNBP periode 2012-2016. Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan analisis rasio. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa rasio ekonomi periode 2012-2016 adalah sangat ekonomis, karena rata-rata rasio ekonomi selama 5 tahun berada dibawah 60%. Rasio efisiensi periode 2012-2016 adalah efisien karena rata-rata rasio efisiensi selama 5 tahun berada dibawah 100%. Sedangkan rasio efektivitas periode 2012-2016 adalah kurang efektif karena rasio efektivitas selama 5 tahun mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan.

**Kata Kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengukuran Kinerja, *Value For Money***

***Abstract*** - *This study purpose to assess the performance of revenue and expenditure of non-tax revenues at the Center for Development of Metrological Resources period 2012-2016 using the concept of value for money. The method that used in this research is descriptive quantitative. The data that used are secondary data of income and expenditure of Non-Tax State Revenue during 2012-2016. Data analysis technique is by using ratio analysis. Based on the analysis results obtained that the economic ratio of 2012-2016 period is very economic, because the average economic ratio for 5 years is below 60%. The efficiency ratio for 2012-2016 is efficient because the average efficiency ratio for 5 years is below 100%. While the effectiveness ratio for the 2012-2016 period is less effective because the effectiveness ratio for 5 years has decreased and significant increase.*

# *Keywords: Non-Tax State Revenue, Performance Measurement, Value For Money*

1. **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan diselenggarakan dengan harapan dapat tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Tim Pengkajian Hukum, Haris (2012: 5) menyatakan “Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) beberapa prinsip yang tidak boleh dikesampingkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan aturan hukum.” Dalam hal ini, semua kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan penerimaan dan belanja negara harus dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerimaan dan belanja negara yang akan dilaporkan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan keuangan negara UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan kekuasaan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tugas-tugas negara yang ditujukan sebagian besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tugas-tugas negara tersebut diperlukan adanya pembiayaan yang bersumber dari pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memacu pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sebagai sumber pendapatan negara, baik dari sektor penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 dijelaskan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dari berbagai sudut pandang penerimaan negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu bentuk pendapatan yang memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan, karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu pilar pendapatan negara disamping pendapatan dari penerimaan pajak dan hibah.

**Tabel 1 realisasi pendapatan dan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian periode 2012-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target Pendapatan** | **Realisasi Pendapatan** |
| 1 | 2012 | Rp 47.500.000 | Rp 1.564.000.000 |
| 2 | 2013 | Rp 70.000.000 | Rp 1.324.682.828 |
| 3 | 2014 | Rp 770.000.000 | Rp 859.265.970 |
| 4 | 2015 | Rp 990.000,000 | Rp 277.250.000 |
| 5 | 2016 | Rp 1.100.000.000 | Rp 680.000.000 |
|  |  |  |  |
| **No** | **Tahun** | **Anggaran Belanja** | **Realisasi Belanja** |
| 1 | 2012 | Rp 1.220.918.000 | Rp 1.124.654.442 |
| 2 | 2013 | Rp 949.124.000 | Rp 861.794.800 |
| 3 | 2014 | Rp 603.988.000 | Rp 469.527.000 |
| 4 | 2015 | Rp 776.556.000 | Rp 38.585.700 |
| 5 | 2016 | Rp 862.840.000 | Rp 202.996.296 |
| Sumber : Laporan realisasi pendapatan dan belanja PNBP di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian | | | |

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mempunyai peran sangat penting dalam dunia kemetrologian, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagai sektor publik yang menyedikan pelayanan jasa berupa pelatihan diklat maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh peserta dan para pelaku organisasi yaitu salah satunya dengan mengatur pengelolaan keuangan negara khususnya penerimaan pendapatan dari pelayanan yang dilaksanakan agar hasil dari pendapatan tersebut dapat memaksimalkan potensi yang ada. Tabel 1 memperlihatkan realisasi pendapatan dan belanja Penerimaaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016.

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja PNBP merupakan laporan keuangan atas pendapatan dan penggunaan dana yang diterima dari pelayanan yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian. terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tabel laporan realisasi pendapatan dan belanja Pusat pengembangan Sumber Daya Kemetrologian yaitu pada tahun 2012 dan 2014 realisasi pendapatan melebihi target pendapatan . Realisasi tersebut berakibat pada belanja yang bersumber dari dana PNBP dapat direalisasikan secara maksimal sesuai pagu. Kemudian, tahun 2015 merupakan realisasi belanja yang terkecil dibandingkan tahun-tahun yang lain.

Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas. Apabila organisasi sektor publik tersebut mampu menyediakan pelayanan publik yang murah dan berkualitas, maka organisasi tersebut akan memperoleh kepercayaan dan dukungan publik.

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu anggaran yang menghubungkan anggaran pemerintah dengan hasil yang diinginkan (*output* dan *outcome*). Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik atau pemerintahan dapat menggunakan konsep *value for money* yang merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana kinerja keuangan pendapatan dan belanja PNBP dengan menggunakan pendekatan *value for money.*

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :1. Bagaimana realisasi dan anggaran belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016. 2. Bagaimana realisasi belanja dan realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016. 3. Bagaimana realisasi dan target pendapatan yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016.

Secara spesifik tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui realisasi dan anggaran belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016. 2. Untuk mengetahui realisasi belanja dan realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016. 3. Untuk mengetahui realisasi dan target pendapatan yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pendekatan *value for money* pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016.

APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan. Ruang lingkup APBN adalah mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut Rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di Bank Sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan kedalam rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN).

Salah satu unsur penerimaan dalam negeri ialah Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 1997 “ Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan.”

Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif dan jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2009: 4) “*Value for money*  merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.”

Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Sedangkan Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu dalam penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dan efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang digunakan. Dalam pengukuran ekonomi, Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan. Sedangkan sebaliknya, apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2009: 135) tujuan yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* adalah : 1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. 2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*. 4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

1. **METODE PENELITIAN**

**Desain Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, pertama-tama melakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan informasi maupun data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan tema dari penelitian yang dilaksanakan, Selanjutnya membuat latar belakang masalah terkait dengan tema dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis membuat kerangka pemikiran yang didasarkan dari teori-teori para ahli dan penelitian terdahulu, Atas dasar teori-teori dari para ahli tersebut kemudian melakukan analisis laporan realisasi pendapatan dan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode 2012-2016.

**Operasionalisasi Variabel**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif maka dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel. Variable yang digunakan yaitu laporan realisasi pendapatan dan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak. Indikatornya adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti dari perusahaan. 2. Teknik kepustakaan dilakukan untuk mencari dan mempelajari teori-teori yang akan dijadikan bahan yang bersangkutan dengan tema penelitian. 3. Teknik wawancara untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap yang bersangkutan dengan objek yang diteliti.

**Teknik Analisis Data**

1. Analisis Ekonomi, ekonomi berarti sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar.
2. Analisis efisiensi, Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas di perusahaan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan.
3. Analisis efektivitas, Efektivitas menggambarkan kemampuan instansi / lembaga sektor publik dalam merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun komponen-komponen PNBP yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang ada.
4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis untuk analisis ekonomi yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan Realisasi Belanja PNBP dengan Anggaran Belanja PNBP. Hasil analisis untuk analisis ekonomi dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan hasil analisis data, pengukuran ekonomi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 dapat diketahui bahwa untuk periode 2012-2016 dapat dikatakan

Tabel 2 Rasio Ekonomi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Tahun 2012-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Anggaran Belanja**  **(a)** | **Realisasi Belanja**  **(b)** | **Rasio Ekonomi**  **%**  **(b/a x 100)** |
| 2012 | Rp. 1.220.918.000 | Rp. 1.124.654.442 | 92.12 |
| 2013 | Rp. 949.124.000 | Rp. 861.794.800 | 90.80 |
| 2014 | Rp. 603.988.000 | Rp. 469.527.000 | 77.74 |
| 2015 | Rp. 776.556.000 | Rp. 38.585.700 | 4.97 |
| 2016 | Rp. 862.840.000 | Rp. 202.996.296 | 23.53 |
| **Rata-rata Rasio Ekonomi** | | | **57.83** |

Sumber : Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja PNBP Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian

sangat ekonomis (hemat cermat). Hal ini dikarenakan, rata-rata rasio ekonomi selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 57.83% berada dibawah 60%. Pada tahun 2016 rasio ekonomi mengalami kenaikan sebesar 18.56% karena pada tahun 2016 realisasi belanja atau penggunaan belanja untuk kegiatan pelaksanaan diklat naik sebesar Rp.164.410.596 dibandingkan tahun 2015.

Hasil analisis untuk analisis efisiensi yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan Realisasi Pendapatan PNBP dengan Realisasi Belanja PNBP. Hasil analisis untuk analisis ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efisiensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber daya Kemetrologian periode 2012-2016 dapat dikatakan sangat efisien. Hal itu dikarenakan rata-rata rasio efisiensi selama 5 tahun tersebut adalah sebesar 47.07% berada dibawah 60%. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15.93%, tetapi walaupun tahun 2016 mengalami kenaikan rasio efisiensi pada tahun 2016 masih dapat dikatakan sangat efisien karena berada dibawah 60% yaitu sebesar 29.85%. pada tahun 2015 merupakan rasio efisiensi terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain yaitu sebesar 13.92%.

Hasil analisis untuk analisis efektivitas yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan Realisasi Pendapatan PNBP dengan Realisasi Belanja PNBP. Hasil analisis untuk analisis ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 diketahui bahwa untuk periode 2012-

Tabel 3 Rasio Efisiensi Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Tahun 2012-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pendapatan**  **(a)** | **Realisasi Belanja**  **(b)** | **Rasio Efisiensi**  **%**  **(b/a x 100)** |
| 2012 | Rp 1.564.000.000 | Rp 1.124.654.442 | 71.91 |
| 2013 | Rp 1.324.682.828 | Rp 861.794.800 | 65.06 |
| 2014 | Rp 859.265.970 | Rp 469.527.000 | 54.64 |
| 2015 | Rp 277.250.000 | Rp 38.585.700 | 13.92 |
| 2016 | Rp 680.000.000 | Rp 202.996.296 | 29.85 |
| **Rata-rata Rasio Efisiensi** | | | **47.07** |

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak PPSDK

2016 dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari rasio efektivitas, selama 5 tahun tersebut rata-rata rasio efektivitas adalah sebesar 1077.29% berada diatas 100%. Pada tahun 2012 merupakan tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Karena pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar Rp.47.500.000 sedangkan realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp.1.564.000.000.

Tabel 4 Rasio Efektivitas Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian Tahun 2012-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pendapatan**  **(a)** | **Realisasi Pendapatan**  **(b)** | **Rasio Efektivitas**  **%**  **(b/a x 100)** |
| 2012 | Rp. 47.500.000 | Rp. 1.564.000.000 | 3292.63 |
| 2013 | Rp. 70.000.000 | Rp. 1.324.682.828 | 1892.40 |
| 2014 | Rp. 770.000.000 | Rp. 859.265.970 | 111.59 |
| 2015 | Rp. 990.000.000 | Rp. 277.250.000 | 28.01 |
| 2016 | Rp. 1.100.000.000 | Rp. 680.000.000 | 61.82 |
| **Rata-rata Rasio Efektivitas** | | | **1077.29** |

Sumber : Laporan Target Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak PPSDK

1. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi dan anggaran belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat Pengembangan Sumber daya kemetrologian periode 2012-2016 yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomi, hasilnya menunjukan bahwa kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 adalah sangat ekonomis, karena rata-rata rasio ekonomi selama 5 tahun tersebut dibawah 60% .
2. Realisasi belanja dan realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat Pengembangan Sumber daya kemetrologian periode 2012-2016 yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, hasilnya menunjukan bahwa kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 adalah sangat efisien, hal ini dikarenakan rata-rata rasio efisiensi untuk 5 tahun tersebut berada dibawah 60%.
3. Realisasi dan target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat Pengembangan Sumber daya kemetrologian periode 2012-2016 yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, hasilnya menunjukan bahwa Kinerja efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian periode 2012-2016 adalah sangat efektif karena rata-rata rasio efektivitas selama 5 tahun tersebut berada diatas 100%.

Terdapat beberapa rekomendasi bagi manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian dan bagi peneliti selanjutnya diantaranya bagi Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian dalam proses perencanaan anggaran sebaiknya lebih memperhatikan rincian atau uraian data-data yang dibutuhkan untuk program pelaksanaan kegiatan diklat serta melakukan evaluasi untuk program pelaksanaan kegiatan diklat periode sebelumnya. Sehingga dapat mengefisiensikan anggaran untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengambil objek yang lebih luas dan diharapkan dalam melakukan penelitiannya memasukkan seluruh kegiatan atau program agar dapat mengukur kinerja secara keseluruhan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Kamaroesid, Herry. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN Mulai T.A. 2013)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK06/2006 tentang *Modul Penerimaan Negara*. Jakarta: Kementrian Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara .

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Teori | Konsep | Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tim Pengkajian Hukum. 2011. *Mekanisme Penarikan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).* Jakarta: Tim Pengkajian Hukum.

Tjandra, W.Riawan. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo